

# PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS DI KECAMATAN CIJEUNJING

Diko Refrianto KP<sup>1</sup>, Agus Nurulsyam Suparman<sup>2</sup>, Irfan Nursetiawan<sup>3</sup>  
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia  
e-mail: [dikorefrianto2712@gmail.com](mailto:dikorefrianto2712@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang menemukan beberapa permasalahan pada Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis di antaranya Dinas Koperasi dan Perdagangan kurang memberikan dorongan motivasi untuk mengembangkan potensi Masyarakat, hal ini di buktikan dengan banyaknya masyarakat yang mempunyai keahlian tapi tidak di arhkan yang akhirnya menjadi sia-sia yang akhirnya menjadi pengangguran., Pemerintah Dinas Koperasi dan Perdagangan kurang meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk mengambil langkah - langkah perubahan., Dinas Koperasi dan Perdagangan kurang memberikan pembinaan dan pendidikan kepada kelompok masyarakat hal ini dibuktikan dengan belum biasanya Dinas dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki Masyarakat., Dinas Koperasi dan Perdagangan kurang memberikan modal kepada masyarakat hal ini di buktikan dengan adanya pelaku usaha yang masih belum bisa mengembangkan usahanya., Dinas Koperasi dan Perdagangan kurang memberikan peluang kepada masyarakat. Adapun desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun analisis data yang dilakukan ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing belum sepenuhnya di laksanakan secara optimal hal ini dapat dilihat dari 10 indikator, dan terdapat 7 indikator yang belum terlaksana dengan baik. Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum optimal, hal ini dilihat karena masih banyaknya hambatan- hambatan terkait pengembangannya.*

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Pelaku UMKM**

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa: modal, teknologi, informasi, dan jaminan pemasaran agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan.

Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami sebagai suatu proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang sektor kehidupan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Target Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju.

Sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang - Undang ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkreaitivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebito, (2019: 30). Adalah:

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Menurut Ismawan Priyono, (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:170) menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- Pengembangan sumberdaya manusia;
- Pengembangan kelembagaan kelompok;
- Pemupukan modal masyarakat (swasta);
- Pengembangan usaha produktif;
- Penyediaan informasi tepat-guna.

Di kecamatan Cijeungjing sendiri ada sekitar 504 pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan Perdagangan kabupaten Ciamis dengan omset yang dimiliki setiap pelaku usaha sekitar 3 – 10 juta per bulan sedangkan aset yang dimiliki sekitar 10 – 50 juta, usaha yang mereka jalani berbagai macam diantaranya mulai dari industri, makanan olahan, kerajinan tangan, peternakan dan lain sebagainya. Namun pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas usaha ataupun produk hanya sekitar 30% dari jumlah UMKM yang terdaftar di Pemerintah Dinas Koperasi dan Perdagangan.

Peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dari masyarakat tersebut cenderung belum memiliki kebutuhan yang menjadi dominan. Karena pola pikir mereka masih sangat sederhana walaupun memiliki bebrapa kekayaan sumber daya alam disekitarnya (seperti lahan tanah berkebun, sawah-sawah, dll). Pendidikan yang seharusnya menjadi tolak ukur tingkat pengetahuan serta keterampilan masyarakat itu belum mempengaruhi secara keseluruhan masyarakat belum mampu mengembangkan usahanya secara optimal, hal ini dikarenakan masih adanya berbagai permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat seperti belum adanya peran pemerintah dinas, terbatasnya penguasaan dan pemilikan akses produksi terutama permodalan dan masih rendahnya penguasaan teknologi karena sebagian masih menggunakan peralatan manual dan informasi pemasaran.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan penulis, masalah yang dihadapi di masyarakat Kecamatan Cijeungjing, ternyata belum optimalnya. Hal ini dibuktikan dari adanya beberapa indikator sebagai berikut:

Kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki para pelaku usaha, hal ini dikarenakan masih kurangnya kegiatan pembinaan, bimbingan dan pendampingan terhadap pelaku usaha sehingga belum mampu mengembangkan kemampuan dan

keterampilan pelaku usaha tersebut dalam menjalankan usahanya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***TUJUAN PEMBERDAYAAN***

Menurut Suharto (2005:60) pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Maksudnya: Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan

menurut Mardikanto (2014:202), ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan

3. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

### ***PENGERTIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Gunawan, 2009: 102).

### ***STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:168) strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu:

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat;
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Menurut Suyono (dalam M. Anwas 2014:89) Strategi Pemberdayaan merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019:167) Strategi Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

1. Strategi sebagai suatu rencana
2. Strategi sebagai kegiatan
3. Strategi sebagai suatu instrumen
4. Strategi sebagai sistem
5. Strategi sebagai pola piker

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang pemberdayaan pemberdayaan

masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Jumlah informan sebanyak 6 orang, dengan rincian; Kepala Bagian Perdagangan Ahli Muda 1 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, pedagang 2 orang, dan kelompok pemuda 2 orang. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan lapangan dengan hal itu diberikan kode agar sumber data tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, menerima dan menemukan pola dalam hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ini didasari oleh dimensi dari indikator strategi pemberdayaan menurut Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:170), yang terdiri dari:

- a) Pengembangan sumberdaya manusia;

- b) Pengembangan kelembagaan kelompok;
- c) Pemupukan modal masyarakat (swasta);
- d) Pengembangan usaha produktif;
- e) Penyediaan informasi tepat guna. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

### **PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan sumber daya manusia mengenai indikator Pemerintah Dinas memberikan dorongan motivasi untuk mengembangkan potensi Sumber daya Manusia dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemerintah dinas untuk mengadakan pelatihan kepada para pelaku usaha ataupun khususnya Masyarakat yang ada di Kecamatan Cijeungjing.

Selanjutnya indikator mengenai Dinas Koperasi meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mengambil langkah-langkah perubahan dalam mengembangkan suatu Pemberdayaan dalam pelaksanaannya belum, hal ini ditandai dengan keterbatasan kemampuan pemerintah dinas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan langkah - langkah perubahan dalam mengembangkan suatu pemberdayaan.

### **PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan kelembagaan kelompok untuk indicator Dinas Koperasi menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh adanya beberapa pelaku usaha yang belum membuat persyaratan untuk pembuatan legalitas.

Selanjutnya indikator mengenai Dinas Koperasi melaksanakan program pembinaan dan pelatihan kepada kelompok UMKM dalam memperkuat pengetahuan dan kemampuan masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih adanya para kelompok masyarakat yang belum bisa berpartisipasi.

### **PEMUPUKAN MODAL MASYARAKAT**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemupukan modal masyarakat (swasta) untuk indikator Dinas Koperasi harus bisa mendukung dan mendorong masyarakat utamanya para pelaku usaha dengan cara memberikan bantuan serta informasi - informasi tentang pasar untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh masih adanya pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam segi permodalan.

Selanjutnya indikator mengenai Pemerintah Dinas Koperasi memberikan dukungan agar pelaku usaha tidak jatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan, dalam pelaksanaannya masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih adanya para pelaku usaha yang terpinggirkan.

### **PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan usaha produktif untuk indikator Pemerintah Dinas Koperasi melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha dalam memperkuat pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh masih adanya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pelaksanaannya sehingga Dinas Koperasi kesulitan dalam melaksanakan program tersebut. Selanjutnya indikator mengenai Dinas Koperasi membantu memfasilitasi pelaku usaha untuk bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam pelaksanaannya masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih adanya kesulitan modal yang di miliki oleh Dinas Koperasi dalam melaksannya.

### **PENYEDIAAN INFORMASI TEPAT-GUNA**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi penyediaan informasi

tepat guna untuk indikator Dinas Koperasi harus bisa memberikan peluang usaha bagi Kaum milenial agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya serta mengambil langkah-langkah perubahan dalam mengembangkan suatu Pemberdayaan dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh masih adanya kurang perhatian terhadap kaum milenial sehingga kemampuan yang di milikinya menjadi sia - sia karena kurangnya Dinas Koperasi dalam memberikan informasi mengenai peluang usaha bagi kaum milenial.

Selanjutnya indikator mengenai Dinas Koperasi melindungi pelaku usaha dengan membantu memasarkan hasil produksusahanya dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi masih belum melaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan kurangnya waktu yang di miliki oleh Dinas Koperasi dalam hal tersebut sehingga para pelaku usaha yang merasa kebingungan ketika mendapatkan masalah dilapangan terutama permasalahan mengenai usahanya karena kurangnya dukungan dari pihak pemerintah Dinas Koperasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Berkaitan Dengan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui hambatan - hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diantaranya yaitu keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan

pengetahuan dari Dinas Koperasi itu sendiri sehingga kesulitan dalam memberikan pengetahuan mengenai sistem perekonomian yang baik, kurangnya kesadaran dari masyarakatnya. Kurangnya pertemuan antara pelaku usaha dan Dinas Koperasi dalam memberikan dorongan motivasi dan juga kurangnya SDM bagi pelaku usaha yang mengakibatkan tidak optimal, Kurangnya pertemuan antara pelaku usaha dan Dinas Koperasi yang mengakibatkan susahnyanya dalam memberi dorongan motivasi, Kurangnya anggaran yang diberikan oleh Dinas Koperasi terhadap pelaku usaha dalam memberikan fasilitas yang memadai, tidak adanya tenaga ahli dalam melakukan pendidikan dan pelatihan.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan - Hambatan Yang Timbul Berkaitan Dengan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan - hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diantaranya yaitu : memperbaiki lokasi dan mobilisasi untuk menunjang, dan juga memberikan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh pelaku usaha, menetapkan rencana terlebih dahulu dalam menjalankan Pemberdayaan kepada Masyarakat dan siapa saja yang akan mendapatkan sesuai kebutuhannya, memberikan Pembinaan dan Pelatihan kepada kelompok UMKM yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dan waktu lebih agar bisa

menentukan waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, pemerintah desa berusaha melakukan komunikasi yang lebih baik dan melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat, Dinas Koperasi memberikan informasi tentang pasar yaitu dengan cara meninjau langsung kelapangan dalam memberikan arahan dan informasi kepada pelaku usaha mengenai persaingan yang tidak seimbang, pemerintah desa berusaha melakukan pendekatan kepada pelaku usaha sehingga arahan dan informasi yang disampaikan mudah di pahami oleh pelaku usaha, Dinas Koperasi berusaha melakukan peninjauan secara langsung secara rutin sesuai arahan dan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan teori-teori di atas bahwa sebuah tujuan pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu-individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengandalkan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki

oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal. Sesuai dengan pendapat Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:170), yang terdiri dari:

- a) Pengembangan sumberdaya manusia;
- b) Pengembangan kelembagaan kelompok;
- c) Pemupukan modal masyarakat (swasta);
- d) Pengembangan usaha produktif;
- e) Penyediaan informasi tepat guna.)

hal ini diketahui dari 10 indikator yang diteliti hanya 3 yang dilaksanakan dengan baik dan sisanya 7 indikator belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan-hambatan yang dialami mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung :

Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global.* Bandung: Alfabeta.

Alfabeta. Moleong\_\_\_\_\_. 2017 *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung :

Alfabeta Miles M dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif.*

Bandung: Remaja Rosda Karya. Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.

Poerwadarminta, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Pranadjaja. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan.* Alumni. Bandung

### **DOKUMEN-DOKUMEN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

